



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
2016-2021**

PADANG, 2018



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Jenderal Sudirman No. 51 Telp. 31401-31402-34425 Padang
<http://www.sumbar.go.id>. e-mail: birohumas@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 065-3942-2018

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan regulasi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 maka berdampak terhadap Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Rencana Strategis Biro Organisasi 2016 – 2021 yang ditetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomo);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Peratuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 68);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : Desember 2018

a.n GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b KEPALA BIRO ORGANISASI


IRWAN, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. *Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang*
2. *Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang*


KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Biro Organisasi menyusun Perubahan Rencana Strategis untuk periode 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.Rencana Strategis Biro Organisasi berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, dalam pelaksanaannya nanti diharapkan semua unsur pimpinan dan pelaksana untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dibutuhkan pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap muatan Renstra sesuai dengan perubahan lingkungan strategis. Sehingga apabila nantinya dapat dilakukan revisi muatan Rencana Strategis dengan tidak merubah tujuan Biro Organisasi yang telah ditetapkan untuk periode 2016-2021.

Padang, 28 Desember 2018

KEPALA BIRO ORGANISASI,


IRWAN, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

DAFTAR ISI

PERUBAHAN RENSTRA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Telah Mencapai Target	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..	22
BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup	32
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis	33
BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN,	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
SERTA PENDANAAN 48**

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIRO ORGANISASI 51

BAB VII : PENUTUP..... 54

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**NOMOR : 065/ 3942 /ORG-2018****TANGGAL : Desember 2018****TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BIRO
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT 2016-2021**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra - OPD) adalah dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program / kegiatan serta indikator kinerja keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra-OPD dari sisi sistem perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan dari sisi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen perencanaan kinerja OPD.

Renstra merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penetapan Renstra secara berkualitas adalah suatu langkah strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja, disamping itu, Renstra-OPD juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, dan Resntra-OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Dengan telah dilakukannya penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan telah ditindak lanjutinya serta disepakatinya perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang RPJMD Provinsi Sumatera barat Tahun 2016 - 2021 maka akan berdampak terhadap terjadinya perubahan Renstra-OPD Biro Organisasi 2016-2021. Perubahan Renstra -OPD Biro Organisasi 2016-2021 dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja beserta target kinerja dan tahapan dalam penyusunan perubahan Renstra-OPD Biro Organisasi Sekretariat Daerah 2016-2021 dilaksanakan dalam beberapa tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 nomor 62);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 68);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 70);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 85).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Perubahan Renstra SKPD Biro Organisasi 2016-2021 adalah untuk memayungi dan memberikan arah penyusunan perencanaan tahunan Biro Organisasi tahun 2016 – 2021, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dalam mewujudkan tujuan Biro Organisasi dengan sasaran strategis serta tindakan yang akan dilaksanakan dan ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Memberikan arah dalam penyusunan Renja OPD dan perjanjian kinerja Biro Organisasi tahun 2016-2021.
- c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra OPD Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah.
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII : PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Biro Organisasi mempointai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kelembagaan dan analisa jabatan, pengembangan kinerja dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 pasal 19 ayat (2) Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

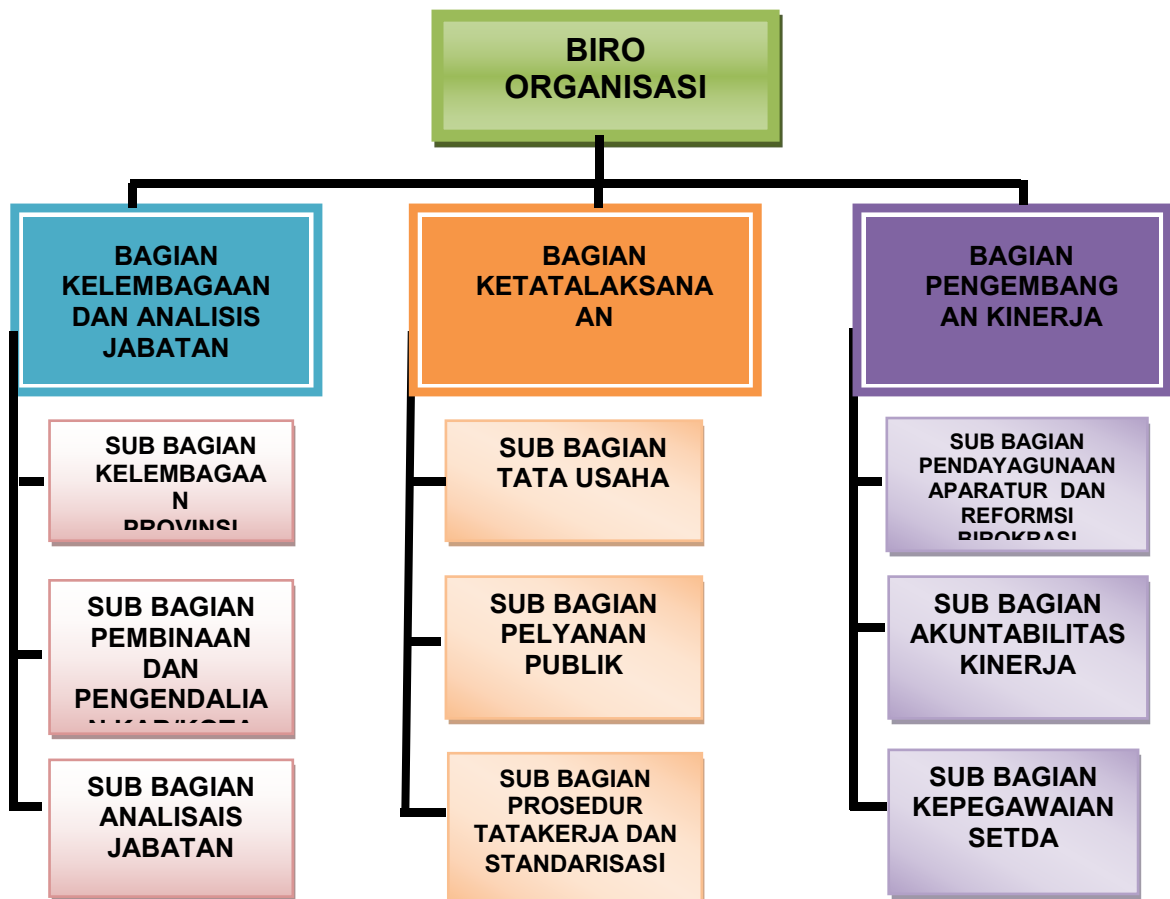
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum kelembagaan dan analisa jabatan, pengembangan kinerja serta ketatalaksanaan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dan analisa jabatan, pengembangan kinerja serta ketatalaksanaan.
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan analisa jabatan, pengembangan kinerja serta ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian dengan 9 (sembilan) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
 - a. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
 - b. Sub Bagian Pembinaan Dan Pengendalian Kabupaten/Kota
 - c. Sub Bagian Analisis Jabatan .
2. Bagian Ketatalaksanaan
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Pelayanan Publik
 - c. Sub Bagian Prosedur Tata Kerja Dan Standarisasi
3. Bagian Pengembangan Kinerja
 - a. Sub Bagian pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi
 - b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
 - c. Sub Bagian Kepegawaian Setda

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada Bagan 1.

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



Dari bagan struktur organisasi diatas, dapat diuraikan uraian tugas pokok dari masing - masing bagian sebagai berikut:

1. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, analisa jabatan, dan pengembangan jabatan fungsional;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, analisa jabatan, dan pengembangan jabatan fungsional;
- c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, analisa jabatan, dan pengembangan jabatan fungsional.

2. Bagian Ketatalaksanaan

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum prosedur dan tatakerja, pembinaan pelayanan publik, dan standarisasi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi prosedur dan tata kerja, Pembinaan pelayanan publik, dan standarisasi;
- c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi prosedur dan tata kerja, Pembinaan Pelayanan Publik, dan standarisasi;

3. Bagian Pengembangan Kinerja

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum akuntabilitas, kinerja dan pendayagunaan aparatur,;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi akuntabilitas, kinerja dan pendayagunaan aparatur;
- c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi akuntabilitas, kinerja dan pendayagunaan aparatur.

Biro organisasi dipimpin oleh seorang kepala biro organisasi dan dalam melaksanakan tugas kepala dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala bagian yaitu Kepala Bagian Ketatalaksanaan, Kepala Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dimana secara langsung Kepala Bagian bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi. Berikut dapat ini dijelaskan uraian tugas kepala Biro Organisasi dan uraian tugas 3 (tiga) Kepala Bagian yang membantu pelaksanaan tugasnya, serta setiap Kepala

Bagian secara struktur dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Uraian tugas dari Kepala Biro Organisasi adalah :

- a. Merencanakan Program Kerja Tahunan Biro Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih lanjut.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- d. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- e. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Organisasi;
- f. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, pengembangan kinerja organisasi;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan OPD;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi ketatalaksanaan OPD;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kinerja OPD;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan aparatur OPD;
- k. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro;
- l. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Biro;
- m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan kinerja organisasi serta pendayagunaan aparatur;
- o. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan biro organisasi;
- p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dari Kepala Bagian Ketatalaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan Program Kerja Tahunan Bagian Ketatalaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih lanjut.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- d. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- e. Menyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum prosedur dan tatakerja, pembinaan pelayanan publik, dan standarisasi;
- f. Menyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi prosedur dan tata kerja, pembinaan pelayanan publik, dan standarisasi;
- g. Menyelenggaraan pelaporan dan evaluasi prosedur dan tata kerja, pembinaan Pelayanan Publik, dan standarisasi;
- h. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

Uraian tugas dari Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan adalah sebagai berikut

- a. Merencanakan Program Kerja Tahunan Bagian kelembagaan dan analisis jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih lanjut.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- d. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.

- e. Mengkaji bahan kebijakan umum kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, analisis jabatan, dan pengembangan jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, analisis jabatan, dan pengembangan jabatan fungsional;
- g. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, analisis jabatan, dan pengembangan jabatan fungsional.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

Tugas pokok dan fungsi dari Bagian Pengembangan kinerja adalah :

- a. Merencanakan Program Kerja Tahunan Bagian pengembangan kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar dapat diproses lebih lanjut.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan atau tertulis agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- d. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
- e. Mengkaji bahan kebijakan umum akuntabilitas dan kinerja, pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi.
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi akuntabilitas dan kinerja, penfdayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi;
- g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja, pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi;
- h. Melaksanakan administarsi kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada per 28 Februari 2017, terdiri atas sumber daya manusia dan aset.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Biro Organisasi per 28 Februari 2017 meliputi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 43 orang dengan rincian menurut Golongan dan Pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap
Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
Per Desember 2018

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	5	2					7
III	2	14		7			23
II			2	5			7
I							
PTT		1	1				2
Jumlah	7	17	3	12			39

2. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi berupa peralatan dan perlengkapan kantor meliputi meja dan kursi, komputer, laptop, almari dan filling kabinet. Jumlah aset yang dimiliki oleh Biro Organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Daftar Sarana Dan Prasarana Biro Organisasi
Per 31 Desember 2018

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Ukuran / cc	Tahun Perolehan	JUMLAH		Jumlah (Rp).
				Barang	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Roda Empat	2000 /cc	2011	1	unit	266.697.000
2	Kendaraan Roda Empat	2000 /cc	2004	1	unit	115.000.000
3	Kendaraan Roda 2 (Honda)	-	2014	1	unit	14.226.200

4	Mesin TIK		2001	2	unit	130.666
5	Mesin TIK		2008	1	unit	3.941.600
6	Lemari Besi		2006	1	buah	474.000
7	Lemari Kaca dorong		2002	3	buah	228.000
8	Lemari Kayu/Kaca		2002	1	buah	325.000
9	Sketsel		2014	6	buah	9.000.000
10	Brankas		2005	1	buah	3.981.000
11	Filing Kabinet		2015	10	buah	37.000.000
12	Filing Kabinet		2012	5	buah	14.152.000
13	Filing Kabinet		2007	4	buah	10.000.000
14	Filing Kabinet		1997	2	buah	5.000.000
15	White Board			1		12.000
12	Air Conditioning		2006	2	unit	5.320.000
13	Air Conditioning		2007	3	unit	16.575.000
14	Komputer mainframe/server		2012	1	unit	29.507.750
15	Server Single (CPU)		2007	1	unit	20.880.000
16	Komputer		2000	1	unit	3.743.000
17	Komputer		2008	1	unit	11.465.000
18	Komputer/PC		2008	1	unit	6.900.000
19	Komputer		2009	2	unit	22.790.000
20	Komputer		2009	1	unit	11.395.000
21	Komputer		2009	1	unit	10.500.000
22	Komputer		2005	3	unit	42.536.142
23	Komputer/PC		2007	1	unit	6.715.000
24	Komputer/PC		2007	1	unit	6.900.000
25	Komputer/PC		2013	2	unit	19.991.950
26	Komputer/PC		2014	1	unit	8.654.000
27	Komputer/PC		2014	2	unit	17.308.000
28	Komputer/PC		2014	2	unit	17.308.000
29	Komputer/PC		2014	2	unit	17.532.996
30	Komputer/PC		2015	3	unit	27.600.000
31	Komputer (Server singel)		2007	1	unit	20.880.000
32	Komputer/PC		2006	1	unit	780.000
33	Lap top		2008	1	unit	16.000.000
34	Lap top		2009	1	unit	23.800.000
35	Lap top		2009	1	unit	7.900.000
36	Lap top		2010	1	unit	8.900.000
37	Lap top		2010	2	unit	22.000.000
38	Lap top		2011	5	unit	48.750.000
39	Lap top		2012	1	unit	10.000.000
40	Lap top		2007	1	unit	24.725.000
41	Lap top		2007	1	unit	23.875.000
42	Lap top		2014	1	unit	12.500.000
43	Printer		2007	3	unit	3.825.000
44	Printer		2006	1	unit	1.781.500
45	Printer		2014	1	unit	950.000
46	Printer		2009	1	unit	2.400.000
47	Printer		2008	1	unit	750.000
48	Printer		2011	4	unit	6.600.000
49	Printer		2009	2	unit	2.500.000
50	Printer		2013	4	unit	9.589.000
51	Printer		2014	1	unit	1.100.000
52	Printer		2015	3	unit	3.000.000
53	Scanner		2008	1	unit	4.000.000
54	Monitor LCD		2009	1	unit	2.950.000
55	Monitor LCD		2010	2	unit	3.094.160
56	UPS		2010	1	unit	635.050

57	UPS 500 Watt		2002	1	unit	780.000
58	DVD RW		2010	1	unit	450.000
59	Flash Disk		2009	3	unit	2.025.000
60	Flasdisk (Hardis External)		2010	1	unit	500.000
61	Keyboard		2010	1	unit	300.000
62	Keyboard		2002	1	unit	78.000
63	Mouse		2001	1	unit	104.000
64	Mouse		2000	1	unit	62.000
65	Mouse Komputer		2000	1	unit	62.000
66	Meja Kerja		2005	2	buah	71.333
67	Meja Kerja (Kayu)		2005	22	buah	784.000
68	Meja Kerja (Kayu)		2007	4	buah	2.013.000
69	Meja Kerja (Kayu)		2002	2	buah	462.000
70	Meja Kerja (Kayu)		2007	6	buah	6.039.000
71	Meja Kerja (Kayu)		2000	6	buah	2.434.000
72	Meja Kerja (Kayu)		2000	1	buah	35.666
73	Meja Kerja (Kayu)		2004	1	buah	462.000
74	Meja Kerja (Kayu)		2006	1	buah	148.000
75	Meja Komputer		2005	3	buah	312.000
76	Kursi kerja eselon II		2014	1	buah	2.700.000
77	Kursi kerja eselon II		2008	1	buah	2.800.000
78	Kursi kerja eselon III		2008	4	buah	10.300.000
79	Kursi kerja eselon III		2014	1	buah	2.300.000
80	Kursi Putar eselon IV		2006	2	buah	2.025.000
81	Kursi Putar eselon IV		2006	4	buah	4.050.000
82	Kursi Putar eselon III		2006	2	buah	4.417.600
83	Kursi besi		2002	1	buah	69.000
84	Kursi besi		1995	9	buah	1.817.182
85	Kursi besi		2001	3	buah	412.000
86	Kursi besi		2002	4	buah	655.000
87	Kursi rapat		2001	12	buah	4.620.000
88	Kursi rapat		2007	6	buah	2.310.000
89	Kursi putar rapat		2006	10	buah	6.888.000
90	Kursi Warna Ping		2006	2	buah	4.134.000
91	Kursi tamu (Sofa)		2008	1	set	14.900.000
92	Kursi tamu (Sofa)		2006	1	set	6.375.000
93	Kulkas		2008	1	unit	3.084.800
94	Jam Dinding/Meja		2006	1	buah	63.000
95	Kamera Digital		2014	1	unit	12.845.050.000
96	Kamera Digital		2009	1	unit	2.500.000
97	LCD Proyektor		2006	1	unit	15.096.000
98	LCD Proyektor (INFUCUS)		2014	1	unit	19.825.000
99	Home Theater/TV LCD 32 inchi		2012	2	unit	10.000.000
100	Telepon		2001	2	unit	2.850.000
101	Buku Referensi		2008	1	buku	93.000
102	Buku Referensi		2009	1	buku	54.000
104	Buku Referensi		2009	1	buku	80.000
105	Buku Referensi		2009	1	buku	60.800
106	Buku Referensi		2009	1	buku	110.000
107	Buku Referensi		2009	1	buku	106.700
108	Buku Referensi		2009	1	buku	105.500
109	Buku Referensi		2010	2	buku	200.000
110	Buku Referensi		2010	2	buku	200.000
111	Buku Referensi		2011	1	buku	900.000
112	Aplikasi Sistem Personal Record		2009	1	Unit	19.500.000

113	Pengembangan Aplikasi Sistem Personal Record	2013	1	Unit	23.000.000
114	Simiko	2015	1	Unit	49.850.000
115	Aplikasi e-SAKIP	2016	1	Unit	47.500.000
116	Lemari Besi 4 Tingkat	2016	8	Unit	17.400.000
117	Komputer PC Lenovo	2016	2	Unit	18.400.000
118	Printer Cannon 2770	2016	2	Unit	2.000.000
119	Printer Epson M200	2016	2	Unit	5.500.000
120	NoteBok/Laptop Asus	2016	2	Unit	26.000.000
121	Kompute PC HP20-C039D	2016	2	Unit	18.200.000
122	Lemari Arsip 4 Tingkat	2016	2	Unit	4.000.000
123	Komputer/PC All In HP 20-C303D Procecor Cor i5 7200 U	2017	2	Unit	24.000.000
124	Pengadaan Skat Ruangan Kerja dan Rapat	2017	2	Unit	45.550.000
125	Pengadaan Pintu Panel (Aluminium)	2017	2	Unit	3000.000
126	AC Sharp AHA SEY-2 PK	2017	3	Unit	28.800.000
127	Pengadaan Lemari Arsip (Prospek)	2017	6	Unit	19.800.000
128	Pengadaan Kursi Futura FTR501	2017	15	Unit	5.250.000
129	Pengadaan Kursi Chairman SC308	2017	3	Unit	2.400.000
130	Pengadaan Meja Rapat ½ Biro	2017	11	Unit	9.365.994
131	Kursi Kerja Pimpinan	2018	4	Unit	31.570.000
132	Meja Kerja Pejabat	2018	4	Unit	49.500.000
133	Kursi Rapat	2018	30	Buah	20.790.000
134	Komputer PC	2018	4	Unit	42.800.000
135	Printer	2018	4	Unit	11.000.000
136	Infocus	2018	1	Unit	14.450.000
137	Layar Projector Otomatis	2018	1	Unit	9.800.000
138	Kendaraan Roda 4	2018	1	Unit	303.750.000
139	Pengadaan AC	2018	4	Unit	39.600.000
140	Pengadaan Scanner	2018	1	Unit	12.750.000
141	Pengadaan Penghancur Kertas	2018	1	Set	4.500.000
142	Pengadaan Lemari Arsip	2018	1	Unit	7.700.000
Total			334		1.982.870.129

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pelayanan Biro Organisasi mencakup pelayanan kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan ketatalaksanaan, pelayanan penguatan akuntabilitas kinerja, pelayanan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan pendayagunaan aparatur, pelaksanaan reformasi birokrasi serta pelayanan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sasaran yang telah dicapai untuk periode 2010 - 2015 adalah :

1. Terwujudnya tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi yang sesuai dengan urusan dan kewewenangannya.
2. Terbentuknya kelembagaan perangkat daerah Kabupaten / kota sesuai aturan.
3. Terwujudnya Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan Tugas sesuai Standar Operasional Prosedur.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik pada unit kerja pelayanan publik (UKPP) Provinsi.
5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi.
6. Meningkatnya kompetensi aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015.

Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 yang diukur berdasarkan capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran tersebut diatas, selanjut dapat dilihat pada tabel T-C.23.

TABEL T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Indikator	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Terwujudnya Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang sesuai dengan Urusan dan kewenangan		1 Jumlah Resturisasi Organisasi SKPD yang ditetapkan dengan Perda 2 Persentase tugas pokok dan fungsi SKPD yang tumpang tindih	- -	√ √			4	2	-	-	-	4	4	3	-	-	-	50	100	60	-	-
2	Terbentuknya kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota sesuai aturan		1 Jumlah Rekomendasi Ranperda OPD kab/Kota yang ditindak lanjuti 2 Persentase Kabupaten/Kota yang besaran Oerorganisasi perangkat daerahnya tidak sesuai aturan yang berlaku	- -	√ √			19	10	-	-	10	9	7	-	-	-	89.47	47.37	70	-	-	
3	SKPD Provinsi Melaksanakan Tugas sesuai Standar Operasional Prosedur		1 Jumlah SKPD Prov. Yang telah menyusun SOP 2 Jumlah SKPD yang telah menerapkan SOP secara efektif 3 Persentase SKPD Provinsi yang telah Menerapkan Standar Operasional prosedur	- - -	√ √ √		10	46	-	-	-	2	44	-	-	-	-	100	95.65	-	-	-	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi		1 Hasil IKM pada 2 unit kerja pelayanan publik Prov Sumbang 2 Jumlah kerja pelayanan Publik yang memperoleh Indeks 80 keatas 3 Rata-rata hasil penilaian IKM Unit kerja Pelayanan Publik	- - -	√ √ √		Baik	Baik	Baik	-	-		Baik	Baik	Baik	-	-	100	100	100	-	-	
5	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi		1 Nilai Hasil Evaluasi Kinerja AKIP Pemerintah provinsi 2 Persentase SKPD dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) > 65-75	- -	√ √		-	-	-	B	B	C	CC	CC	CC	CC	BB	-	-	-	92.89	96.09	
6	Meningkatnya Kompetensi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat		1 Persentase PNS Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Mengikuti Diklat	-	√		-	-	-	35	40					22.86	33.80					65.31	
7	Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai yang Ditetapkan Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015		1 Persentase Program/Kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terlaksana	-	√		-	-	-	30	40		0	0	0	53.52	55.44		0	0	0	178.40	

Dari tabel T-C.23. dapat dilihat, bahwa kinerja pelayanan Biro Organisasi yang telah mencapai atau diatas target adalah sebagai berikut:

A. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Yang Telah Mencapai Target

1. Pelayanan ketatalaksanaan

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan adalah Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur dengan indikator kinerja jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang telah menyusun SOP, target 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah sampai tahun kelima Renstra Perangkat Daerah (2015) telah direalisasi sebanyak 46 Perangkat Daerah dengan tingkat capaian 100 %.

Keberhasilan ini disebabkan, adanya perhatian dan komitmen yang tinggi dari Gubernur terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya aspek ketatalaksanaan atau bisnis proses pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pelayanan penguatan akuntabilitas kinerja

Pelayanan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi yang diukur dengan indikator kinerja, nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi, target sampai tahun ke 5 Renstra Perangkat Daerah (2015) dengan predikat B direalisasi BB.

Keberhasilan ini disebabkan oleh karena, tingginya perhatian dan komitmen Gubernur terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan didukung oleh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan dilaksanakannya penyempurnaan dokumen perencanaan yang difasilitasi oleh tenaga ahli dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Pelayanan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sasaran yang akan dicapai dalam pelayanan pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu, reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

sesuai yang ditetapkan dalam road map atau pedoman Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2011-2015 yang diukur berdasarkan indikator kinerja persentase program/kegiatan road map reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terlaksana, target sampai akhir tahun kelima Renstra Perangkat Daerah (2015) sebesar 40 % direalisasi sebesar 55,44 %.

Keberhasilan ini disebabkan oleh karena adanya perhatian dan komitmen yang tinggi dari Perangkat Daerah penanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan didukung oleh komitmen yang tinggi dari Gubernur dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Yang Tidak Mencapai Target

1. Pelayanan Kelembagaan

Pelayan kelembagaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan urusan, kewenangan dan kebutuhan, dengan sasaran terwujudnya tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang sesuai dengan urusan dan kewenangan, indikator kinerja persentase tugas pokok dan fungsi SKPD yang tumpang tindih target sampai akhir Renstra Perangkat Daerah (2015) 6,12 % direalisasi sebesar 10,20.

Tidak tercapainya target yang ditetapkan disebabkan karena evaluasi kelembagaan belum terlaksana dengan baik, sehingga rekomendasi dari hasil evaluasi tidak dapat ditindak lanjuti.

2. Pelayanan Pendayagunaan Aparatur

Pelayanan pendayagunaan aparatur dalam peningkatan kompetensi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui pendidikan dan pelatihan. Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan pelayanan ini, meningkatnya kompetensi PNS Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan alat ukur keberhasilan/kegagalannya persentase PNS Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti Diklat dengan target 40 % direalisasi 33,80 %.

Tidak tercapainya target yang ditetapkan disebabkan karena belum terwujudnya koordinasi penugasan PNS mengikuti Diklat. Hal terjadi disebabkan oleh karena kewenangan dan penyediaan anggaran untuk penugasan PNS mengikuti Diklat berada pada Biro masing-masing.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat 2010-2015

Uraian	Anggaran (Rp.000) pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran (Rp.000) pada Tahun ke-						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Pegawai	740.825	1.013.705	1.861.860	1.657.364	986.700	-	661.700	931.805	1.724.030	1.580.629	912.201	-	89,3	91,9	92,6	95,4	92,4	-	103	110
Belanja Barang dan Jasa	2.035.228	2.552.921	3.044.141	2.824.780	2.995.717	3.390.851	1.872.581	2.294.656	2.698.857	2.415.519	2.397.014	2.757.107	92,0	89,9	88,7	85,5	80,0	81,3	45	31
Belanja Modal	41.110	326.700	34.152	30.000	145.119	124.932	37.254	324.947	34.152	29.581	127.249	124.140	90,6	99,5	100	98,6	87,7	99,4	298,7	999
TOTAL PAGU	2.817.163	3.893.326	4.940.153	4.512.144	4.127.536	3.515.783	2.571.535	3.551.408	4.457.039	4.025.729	3.436.464	2.881.247	91,3	91,2	90,2	89,2	83,3	81,95	17,37	37

Dari tabel T-C.24. dapat dilihat, bahwa rasio realisasi dan anggaran termasuk baik dalam periode 2010-2015 adalah pada tahun 2010 sebesar 91,30 %, tahun 2011 sebesar 91,20 %, dan tahun 2012 sebesar 90,20 %. Baiknya realisasi dibandingkan dengan anggaran yang tersedia disebabkan karena adanya konsistensi kebijakan pelaksanaan anggaran yang diterapkan.

Sedangkan rasio realisasi dan anggaran yang kurang baik terjadi pada tahun 2013 sebesar 89,20 %, tahun 2014 sebesar 83,30 % dan tahun 2015 sebesar 81,95 %. Kurang baiknya rasio realisasi dan anggaran tahun 2013-2015 disebabkan adanya perubahan kebijakan dan standar pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Biro Organisasi dalam lima tahun ke depan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

A. Tantangan

1. Belum sesuai kompetensi sumberdaya aparatur dengan jabatan yang dipangkunya
2. Partisipasi Kabupaten/kota dan Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan program pemerintah daerah
3. Mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

B. Peluang

1. Kuantitas sumberdaya aparatur yang besar
2. Komitmen pimpinan lembaga untuk mendukung program dan visi, misi pemerintah daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Skpd Prov. Sumbar dan Kab/kota yang organisasinya sudah sesuai dengan ketentuan		% SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran	<ul style="list-style-type: none"> •Ketersediaan informasi tentang regulasi terbaru terkait tugas dan fungsi biro organisasi •Kompetensi pejabat yang membidangi untuk memberikan fasilitasi terhadap kabupaten/ kota dan SKPD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> •Komitmen pimpinan lembaga untuk mendukung program pemerintah daerah •Partisipasi kabu/kota dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan program pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> •Masih ada SKPD Provinsi yang organisasinya belum sesuai dengan ketentuan •Ukuran organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan. •Tumpang tindih tupoksi antar SKPD • Masih ada organisasi dan tata kerja di
		% SKPD Provinsi yang ditata kelebagaannya			
		% SKPD Provinsi yang telah dievaluasi organisasi dan tata kerjanya			
		% UPT Prov yang ditata ulang kelebagaannya sesuai peraturan yang berlaku			
		% Ka/kota yang telah dievaluasi organisasi dan tata kerjanya			

					<p>kab/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih ada kab/kota yang tidak melaksanakan fasilitasi dalam penataan organisasi dalam penataan organisasi perangkat daerahnya.
<p>SKPD Prov. Sumbar dan Kab/kota yang sudah menyusun SOP, SPP dan IKM sesuai dengan ketentuan serta memiliki tata hubungan kerja hasil analisis gambaran pelayanan SKPD</p>		<p>% SKPD prov yang menyusun SOP, SPP dan IKM sesuai pedoman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan informasi tentang regulasi penyusunan SOP, SPP dan IKM. • Kompetensi aparatur dalam melaksanakan penyusunan SOP, SPP dan IKM. • Inovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan terhadap pentingnya SOP, SPP dan IKM untuk pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan. • Perubahan regulasi dalam pelaksanaan penyusunan SOP, SPP dan IKM yang dikeluarkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua SKPD Provinsi menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan • Belum semua kab/kota menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan • Tata hubungan kerja dan ketatalaksanaan pemerintahan belum sesuai ketentuan
		<p>% kab/kota yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SOP, SPP dan IKM</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua SKPD Provinsi menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan • Belum semua kab/kota menyusun
		<p>% SKPD provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintah sesuai ketentuan</p>			<p>% unit pelayanan provinsi dan kab/kota yang telah melaksanakan inovasi dan pelayanan prima</p>

					SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatan pada SKPD dan UPT Prov Sumbar		% SKPD provinsi yang komposisi aparaturnya memiliki kelas jabatan dan sesuai dengan syarat formasi serta kompetensi yang dibutuhkan.	<ul style="list-style-type: none"> •Ketersediaan peraturan yang mengatur standar kompetensi jabatan. •Peraturan tentang pola karir. 	<ul style="list-style-type: none"> •Komitmen terhadap penerapan standar kompetensi jabatan dan pola karir 	<ul style="list-style-type: none"> •Belum semua SKPD dan UPTD Prov serta kab / kota memahami dengan baik tentang anjab, ABK, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan
		% UPT provinsi yang komposisi aparaturnya memiliki kelas jabatan dan sesuai dengan syarat formasi, serta kompetensi yang dibutuhkan			
		% Kab/kota yang telah dievaluasi komposisi aparaturnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku			<ul style="list-style-type: none"> •Belum semua SKPD dan UPTD Prov serta kab / kota Belum semua SKPD dan UPTD Prov serta kab / kota menyusun anjab dan ABK •Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan pada SKPD dan UPTD Provinsi maupun kab/kota
Pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov Sumbar		IKM PNS	<ul style="list-style-type: none"> •Ketersediaan data informasi pelayanan. •Peraturan tentang pelaksanaan IKM 	<ul style="list-style-type: none"> •Partisipasi dalam melaksanakan pelayanan •Ketersediaan sarana dan prasarana 	Belum dilaksanakan IKM PNS
SKPD Provinsi dan Kab/kota		% SAKIP SKPD Prov Sumbar berpredikat BB	<ul style="list-style-type: none"> •Peraturan tentang penerapan SAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> •Komitmen pimpinan dalam penerapan 	<ul style="list-style-type: none"> •Belum semua SKPD Provinsi memiliki tim
		% SAKIP			

belum semua melaksanakan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Kab/kota yang berpredikat BB	<ul style="list-style-type: none"> •Bimbingan dalam penyusunan Sakip •Kompetensi aparatur dalam melaksanakan SAKIP 	SAKIP <ul style="list-style-type: none"> •Partisipasi Kabupaten / Kota dalam melaksanakan program SAKIP 	SAKIP <ul style="list-style-type: none"> •Belum semua Kab/kota memiliki tim SAKIP •Belum semua Kab/kota memiliki tim SAKIP
SKPD Prov Sumbar dan Kab/kota belum semuanya melaksanakan budaya kerja sesuai ketentuan		Jumlah KBK di SKPD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> •Peraturan tentang pelaksanaan budaya kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> •Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan budaya kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> •Belum semua SKPD Provinsi memiliki KBK
		Jumlah KBK Kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> •Sosialisasi tentang pentingnya budaya kerja 		<ul style="list-style-type: none"> •Belum semua SKPD Kab/kota memiliki KBK

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021, Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021 adalah:

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

2. Misi

Dari visi tersebut diatas juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya sebanyak 5 butir sebagai berikut:

a.	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais dan budaya berdasarkan filosofi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
b.	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
c.	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
d.	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
e.	Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari lima misi Gubernur dan Wakil Gubernur diatas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi akan mempengaruhi misi 2, yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Biro Organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi biro yang dapat mempengaruhi pencapaian misi Kepala Daerah diatas adalah sebagai berikut

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Organisasi
Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;			
2.	1). Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penegakkan disiplin PNS • Jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur masih kurang 	SDM pengelola tugas semua bagian masih kurang baik kuantitas maupun kualitasnya	Perda tentang pembinaan aparatur telah ada
	2). Program pendidikan kedinasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan PNS mengikuti diklat belum 	Seleksi PNS peserta diklat belum optimal.	Komitmen Pimpinan dalam

		berdasarkan analisis kebutuhan diklat		Peningkatan Manajemen SDM Aparatur
	3) Program peningkatan manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kualitas manajemen kinerja 	Belum adanya kewenangan yang jelas dalam sistem manajemen PNS dalam peningkatan kompetensi SKPD.	Komitmen pimpinan dalam peningkatan manajemen SDM aparatur
	4). Program Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum,	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penegakan disiplin PNS 	Belum adanya komitmen pimpinan dalam peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum	Komitmen Pimpinan dalam Menetapkan Budaya Kerja
	5). Program Peningkatan akuntabilitas kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penguatan komitmen pelaksanaan SAKIP • Peningkatan kualitas SDM penyusun SAKIP • Peningkatan kualitas AKIP provinsi • Belum dipahaminya teknis penyusunan PK dengan baik oleh pejabat penyusun PK • Belum dilakukannya evaluasi PK secara berkala • Pelaporan SAKIP belum tepat waktu 	Komitmen PNS untuk pelaksanaan AKIP	Adanya Komitmen gubernur untuk peningkatan SAKIP daerah.
	6). Implementasi penanganan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penaganan pengaduan masyarakat 	Kurangnya komitmen atasan dalam menindak lanjuti	Pengaduan masyarakat dilayani dengan baik.

			pengaduan masyarakat	
	7) Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan 	Komitmen PNS dalam pelayanan informasi masih kurang	Pelayanan administrasi kearsipan telah dilakukan walaupun pengelolaan informasinya masih rendah.
	8) Pengelolaan e – Government Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya IT dalam pengelolaan SAKIP 	Belum optimalnya pengelolaan e government pemda.	Adanya peraturan yang mengatur Penerapan e-government pada Pemprov Sumbar
	9). Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang evaluasi perbaikan SAKIP masih kurang 	Belum adanya sosialisasi hasil evaluasi SAKIP	Informasi penyelenggaraan pemerintahan diperoleh melalui pejabat yang melakukan perjalanan dinas dan mass media.
	10).Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> • SAKIP SKPD Prov Sumbar masih dominan C 	Masih rendahnya kompetensi PNS dalam penyusunan SAKIP	Adanya tim SAKIP SKPD
	11).Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Prototype OPD penataan kelembagaan belum ada • Perlu adanya penguatan kelembagaan dalam penerapan reformasi birokrasi 	Belum ditetapkannya Perda tentang OPD	Adanya komitmen yang kuat gubernur dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
	12).Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya pengembangan 	Pengumpulan data dan informasi	Data dan informasi dari media masa

		data dan informasi pembangunan	pembangunan terupdate masih kurang.	dan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
	13). Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah 	Masih kurangnya informasi tentang tata koordinasi perencanaan pembangunan daerah.	Adanya media untuk koordinasi perencanaan pembangunan daerah
	14). Pembangunan Materi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada Perda tentang OPD dalam penataan kelembagaan daerah sehubungan dengan adanya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 	Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 belum selesai dilaksanakan pemerintah;	Biro Hukum punya komitmen kuat dalam pembangunan materi hukum.
	15). Peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • SOP belum menggunakan prinsip reformasi birokrasi • SOP setiap perizinan belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat • Belum optimalnya pelaksanaan SOP • Peta SOP belum ada pada masing-masing SKPD • Lemahnya komitmen pimpinan dalam melakukan penataan ketatalaksanaan secara terencana, melembaga dan berkelanjutan. 	Komitmen pimpinan dalam pelayanan publik masih kurang	Perda tentang penyelenggaraan pelayanan publik

		<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya survey menyeluruh tentang kualitas pelayanan publik. • Penggunaan TI untuk pelayanan publik masih parsial • Implementasi Pelayanan prima masih rendah • Masih rendahnya kompetensi, inovasi dan budaya pelayanan bermutu 		
--	--	--	--	--

3. Sasaran

Sasaran dari Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2016-2021 adalah

1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur;
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur;
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Biro Organisasi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Biro Organisasi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Belum optimalnya manajemen aparatur	Belum adanya kewenangan yang jelas dalam sistem manajemen PNS dalam peningkatan kompetensi SKPD.	Komitmen pimpinan dalam peningkatan manajemen SDM aparatur

2.	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	SAKIP Kab/kota masih dominan bernilai C	Masih rendahnya kompetensi PNS dalam penyusunan SAKIP	Adanya Tim SAKIP daerah
3.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	SDM aparatur masih rendah baik kuantitas maupun kualitasnya	Adanya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan SDM
4.	Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Belum adanya sinergitas antara pelaku pembangunan.	Manajemen SDM masih rendah	Adanya Komitmen pimpinan dalam peningkatan SDM
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	1. SOP pelayanan publik belum sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Peta SOP belum ada pada masing-masing SKPD	Banyaknya masukan dari masyarakat dan adanya komitmen dari pimpinan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi pada prinsipnya adalah menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan kinerja organisasi serta pendayagunaan aparatur organisasi perangkat daerah. Tugas pokok ini tidak ada hubungannya dengan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis sehingga dalam bagian ini tidak ada pembahasannya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan seluruh pejabat struktural dan pejabat non struktural dilingkungan Biro Organisasi dengan menggunakan metode Brainstorming. Berdasarkan pembahasan dengan metoda dimaksud, Isu-isu strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

➤ **Kelembagaan,**

1. Belum terwujudnya kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2. Pengisian Jabatan belum berdasarkan Analisis Jabatan.
3. Masih ada tupoksi SKPD yang tumpang tindih.

➤ **Ketatalaksanaan,**

1. Ketatalaksanaan, dengan adanya pembagian urusan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan terjadinya perubahan pada perangkat daerah, dan hal ini telah disikapi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini akan berpengaruh kepada standarisasi terhadap sistem dan prosedur kerja perangkat daerah yang baru dibentuk karena dengan adanya penataan kelembagaan daerah yang baru akan berimbas kepada penataan ketatalaksanaannya yang berdasarkan kepada tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah itu sendiri, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa penyusunan SOP akan berpengaruh terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah.
2. Pelayanan Publik, merupakan tugas utama dari pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan publik, setiap unit kerja pelayanan publik harus mematuhinya dan menjadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang secara jelas akan menjadikan konstruksi birokrasi sebagai pelayanan publik yang berposisi sebagai pengabdian rakyat. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik pada pemerintah daerah pada setiap unit kerja pelayanan publik harus

mengembangkan fungsi pelayanan dengan inovasi – inovasi pelayanan yang bertujuan agar dapat terlayani masyarakat dengan baik, disamping pembinaan secara berkelanjutan dari proses penyelenggaraan pelayanan perlu dilakukan dengan mencari tau seberapa jauh masyarakat dapat terlayani dengan baik.

➤ **Akuntabilitas Kinerja,**

1. Masih kurangnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam menerapkan SAKIP
2. Kurangnya keselarasan antara sistem perencanaan, Penganggaran dan SAKIP
3. Kurangnya kompetensi pegawai pengelola SAKIP

➤ **Sumber Daya Manusia Aparatur**

1. Masih rendahnya disiplin Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah
2. Kurangnya Kapabilitas / Kompetensi Aparatur
3. Masih rendahnya Budaya Kerja positif dari Aparatur Sipil Negara
4. Aparatur Sipil Negara yang tersedia belum sesuai dengan formasi
5. Belum berjalan secara optimal mens system sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 2014
6. Belum diberdayakannya secara optimal tenaga non Aparatur Sipil Negara.

➤ **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perencanaan kinerja organisasi yang baik dan menetapkan indikator kinerja utama yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan disamping itu perlu juga diterapkan indikator-indikator kinerja kinerja agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil serta terarah. Oleh karena itu secara konseptual indikator kinerja merupakan alat penting dalam membangun system pengukuran kinerja

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- a) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi
- b) Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
- c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- d) Meningkatnya Kinerja Organisasi

2. **Sasaran**

Dari Visi, Misi dan Tujuan Biro Organisasi yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

a. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik, dan apabila e-SAKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan, hal ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah.

b. **Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan**

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dasar penataannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kelembagaan yang tepat fungsi dan sasaran maka diperlukan penataan jabatan yang efektif dan efisien.

c. **Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik.**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atau penduduk dalam bentuk barang, jasa dan atau pelayanan administratif.

d. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah menjadi komitmen dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang digulirkan dalam Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara di awal tahun 1998. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan salah satu prioritas pembangunan 2016-2021 yaitu Meningkatnya Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah. Untuk terlaksananya Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi dimaksud secara efektif dan efisien berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi.

Target indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana dijelaskan diatas tahun 2016-2021 selanjutnya dapat dilihat pada tabel T-C.25.

Tabel T.C 25.**Target Kinerja Biro Organisasi 2016-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	nilai	-	BB				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	Jumlah	-	-	2	5	8	15
2.	Terwujudnya Penataan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	- Meningkatnya Penataan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	- Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	51	55	-	-	-	

		Perundang-Undangan									
	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	- Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	%	-	-	60	70	90	100
3.	Terwujudnya Pelayanan Prima Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rata-rata IKM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Rata-rata IKM	Nilai	-	75	-	-	-	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata IKM	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	- Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	Nilai	-	-	10	10	15	15
4.	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi 4.2 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan - Realisasi Fisik (%) - Realisasi Keuangan (%)	Nilai	-	B	-	-	-	-
	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 4.4 Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program /Kegiatan - Realisasi Fisik (%) - Realisasi Keuangan (%)	Nilai	-	-	BB	BB	BB	BB
						100	100	-	-	-	-
						95	95	-	-	-	-
						-	-	100	100	100	100
						-	-	95	95	95	95



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi dan kebijakan, Biro Organisasi melaksanakannya dengan penentuan faktor eksternal dan internal dengan penentuan peluang serta tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun penentuan alternatif strategi tersebut adalah :

Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi, OPD Provinsi dan Kab/Kota

Faktor Eksternal	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adanya peraturan perundangan sebagai dasar hukum; 2. Besarnya dukungan dan kepala daerah yang didukung komitmennya dari OPD Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota akan peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. 	<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian OPD Provinsi belum memahami mengenai Sistem AKIP secara Menyeluruh.
Faktor Internal	<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah; 	<p>Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundangan yang mengatur serta dukungan dari pimpinan memberikan legalitas terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya himbauan dari pimpinan dengan didukung sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga meningkatkan pemahaman terhadap SAKIP di lingkungan Prov. Sumatera Barat. 	

<p>2. Telah tersusunnya pedoman dalam melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maupun penilaian KBK;</p> <p>3. Telah tersusunnya Tim SAKIP internal serta tim evaluasi SAKIP di lingkungan Pemprov Sumatera Barat.</p>	<p>2. Komitmen dari dan OPD Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota memudahkan dalam mendukung pencapaian sasaran;</p> <p>3. Dengan adanya pedoman dalam melaksanakan evaluasi maupun penilaian dan tingginya keikutsertaan OPD dan Kabupaten/Kota dalam kegiatan yang diselenggarakan memungkinkan untuk meningkatkan standar penilaian sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan kinerja dari OPD dan Kabupaten / Kota.</p>	
<p>Kelemahan :</p> <p>1. Tingkat pemahaman SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan;</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Meningkatkan pemahaman SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah berdasarkan peraturan perundangan serta kebijakan dari kepala daerah;</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan pendampingan serta meningkatkan pemahaman bagi OPD dan Kabupaten / Kota akan pentingnya menciptakan SAKIP yang menyeluruh.</p>

**Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Terwujudnya Kelembagaan Yang
Tepat Fungsi Dan tepat Ukuran**

<p align="center">Faktor Eksternal</p> <p align="center">Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <p>1. Peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan, Jabatan dan Penataan Jabatan;</p> <p>2. Komitmen dari OPD terkait penataan kelembagaan dan</p>	<p>Tantangan :</p> <p>1. Adanya tupoksi OPD yang tumpang tindih;</p> <p>2. Pembagian tugas pegawai yang belum sesuai dengan jabatan</p> <p>3. Tidak ada sanksi tegas atas ketidak sesuaian penataan kelembagaan yang</p>
--	--	--

	penataan jabatan;	dilakukan OPD. 4. Tidak adanya sanksi yang tegas atas ketidak sesuaian pembagian tugas pegawai dengan jabatan 5. Tidak adanya perbedaan tingkat kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta penataan jabatan yang efektif dan efisien; 2. Kesiapan data dan informasi pendukung dalam melakukan penataan kelembagaan dan penataan jabatan. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundangan yang mengatur serta dukungan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dan penataan jabatan yang efektif dan efisien; 2. Komitmen dari pimpinan dan OPD memudahkan dalam pelaksanaan penataan kelembagaan dan penataan jabatan; 3. Dengan adanya komitmen OPD dalam pengumpulan data untuk penataan kelembagaan dan penataan jabatan. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya kesepakatan di tingkat pembuat kebijakan internal dengan dukungan komitmen pimpinan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak tersinkronisasi satu sama lain; 2. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran sesuai ketentuan dan penataan jabatan yang efektif dan efisien.
<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi pendukung untuk melakukan analisis dan evaluasi organisasi; 2. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan analisis jabatan; 3. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan pemahaman atas peraturan perundangan untuk analisis dan evaluasi OPD secara proporsional; 2. Perlunya peningkatan pemahaman atas peraturan perundangan untuk analisis dan evaluasi OPD secara 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan; 2. Meningkatnya kompetensi SDM dalam melakukan analisis jabatan; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan dan jabatan secara

dan jabatan secara menyeluruh dan tersistem.	proporsional 2. Perlunya menciptakan sistem evaluasi yang menyeluruh dan mendalam terkait penataan kelembagaan dan jabatan pada Perangkat Daerah termasuk UPT yang ada di bawahnya.	mendalam dan menyeluruh.
--	--	--------------------------

**Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Terwujudnya Fasilitasi Kelembagaan
Perangkat Daerah Kabupaen / Kota**

Faktor Eksternal Faktor Internal	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan; 2. Komitmen dari OPD dan Kabupaten/Kota terkait fasilitasi kelembagaan; 	<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sinkronya penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. Peninjauan ulang materi peraturan perundang-undangan.
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/kota; 2. Kesiapan data dan informasi pendukung dalam elakukan fasilitasi kelembagaan. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundangan yang engatur serta dukungan dari pimpinan memberikan melaksanakan fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kab/kota; 2. Komitmen dari pimpinan dan OPD memudahkan dalam pelaksanaan fasilitasi kelembagaan; 3. Draft peraturan yang disusun agar diselaraskan dengan ketentuan perundangan yang ada; 4. Dengan adanya komitmen OPD dalam penyusunan peraturan akan mempermudah penetapan peraturan yang disusunnya. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya kesepakatan di tingkat pembuat kebijakan internal dengan dukungan komitmen pimpinan dalam menyikapi peraturan penyusunan perundangan ; 2. Komitmen untuk mewujudkan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan daerah.

Kelemahan : 1. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi pendukung untuk melakukan perbaikan materi fasilitasi kelembagaan; 2. Proses fasilitasi perundangan kabupaten/kota masih membutuhkan waktu yang cukup lama.	Alternatif Strategi : 1. Perlunya peningkatan pemahaman atas materi peraturan perundangan yang akan difasilitasi penataannya; 2. Perlunya analisis tentang materi peraturan sebelum difasilitasi penetapannya.	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis materi peraturan perundangan; 2. Fasilitasi penetapan peraturan perundangan dilaksanakan terhadap aspek materi dan aturan penyusunan perundangannya.
---	--	--

**Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Faktor Eksternal	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adanya peraturan perundangan tentang SPP; 2. Sudah adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang pelayanan publik dan IKM; 3. Kesadaran dan komitmen yang tinggi dari OPD dan Kabupaten / Kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 	<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh OPD menyusun SPP; 2. Kurangnya pemahaman OPD dan Kabupaten / Kota terhadap pengkajian, penyempurnaan dan evaluasi pelaksanaan SOP; 3. Sebagian besar OPD Provinsi belum melakukan inovasi pelayanan publik
Faktor Internal	<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aturan dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima; 2. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima; 3. Adanya komitmen pimpinan dalam penyusunan SPP; 4. Telah tersusunnya 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Komitmen dari pimpinan OPD dalam penyelenggaraan pelayanan prima; 3. Kesiapan OPD dalam melaksanakan
	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya himbauan dari pimpinan untuk menyeelnggarakan pelayanan publik sesuai peraturan;SPP; 2. Perlunya dilakukan Sosialisasi tentang peraturan pelaksanaan danpenyelenggaraan pelayanan publik; 	

kriteria penilaian UKPP dan inovasi pelayanan publik;	penyusunan SPP; 4. Kesiapan dari OPD dalam menciptakan inovasi pelayanan publik.	3. Adanya himbauan dari pimpinan terkait penyusunan SPP; 4. Adanya kriteria penilaian UKPP dan inovasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kelemahan : 1 Keterbatasan SDM dalam penyelenggaraan pelayanan public 2 Belum adanya pedoman dasar dalam melakukan penyusunan SPP bagi OPD 3 Keterbatasan SDM dalam melakukan penilaian UKPP dan inovasi pelayanan publik	Alternatif Strategi : 1. Perlunya peningkatan kompetensi bagi SDM dalam menyelenggarakan pelayanan publik; 2. Perlunya menyusun pedoman untuk penyusunan SPP; 3. Perlunya bimbingan dalam pengembangan pelayanan melalui inovasi pelayanan.	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kompetensi SDM dalam meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Penyusunan pedoman dasar Untuk penyusunan SPP; 2. Meningkatkan bimbingan teknis dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Faktor Eksternal	Peluang 1. Sudah adanya Peraturan yang mengatur Penataan Tata Kelola Organisasi 2. Kesadaran dan Komitmen OPD dalam melaksanakan Penataan Tata Kelola Organisasi	Tantangan 1. Belum seluruh OPD meningkatkan Pengaturan Tata Kelola yang baik 2. Masih lemahnya koordinasi Pelayanan Tata Kelola Organisasi yang baik
------------------	--	--

<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi 2. Adanya kesiapan data dan informasi pendukung untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang baik 	<p>Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman dalam mewujudkan Tata Kelola Organisasi 2. Menjaga komitmen dalam pelayanan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan dan peraturan 	<p>Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang baik 2. Perlu dilakukan bimbingan teknis dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang baik
<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM dalam memahami dan peraturan untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang baik 2. Belum terlaksananya pengawasan intern dengan baik 	<p>Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan pemetaan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan dan peraturan 2. Mengoptimalkan sosialisasi pengawasan intern organisasi 	<p>Alternatif Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan dalam peningkatan kompetensi aparatur untuk mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang baik 2. Meningkatkan peranan pengawasan intern organisasi

Berdasarkan analisa di atas, dapat dirumuskan strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai sasaran lima tahun kedepan. Adapun strategi dan kebijakan Biro Organisasi Setda Prov Sumbar dalam meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ditampilkan pada tabel T-C.26.

TABEL T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah Yang Berkualitas				
N O	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Profesional			
1	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah - Terwujudnya Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah - Meningkatkan Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Aparatur Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Disiplin ASN Sekretariat Daerah. - Meningkatkan jumlah PNS mengikuti Diklat teknis, Fungsional dan Struktural - Menyusun Rekomendasi Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Aparatur Provinsi Sumbar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan disiplin ASN berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 - Pengembangan kompetensi sebagai hak PNS berdasarkan UU 5 Tahun 2014
2.	Misi 2 : Meningkatkan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah			
	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Yang Akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi, OPD Provinsi dan Kab/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan SAKIP sebagai budaya kerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Sumbar No. 65 Tahun 2012
3	Misi 3 : Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Yang Dinamis Sesuai Dengan Kebutuhan,			
	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Penataan OPD Prov.Sumbar Dan Kabupaten / Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran - Terwujudnya penataan jabatan yang efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. - Meningkatkan Fasilitas Kelembagaan OPD Kab/Kota - Penataan jabatan yang efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan OPD Provinsi dengan pengkajian dan evaluasi ketepatan tupoksi dan urusan - Mengendalikan pembentukan OPD melalui verifikasi dan fasilitas - Penetapan jabatan pada Perangkat Daerah dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengkajian dan evaluasi kelembagaan OPD sesuai peraturan perundang-undangan. - Besaran organisasi Kab/Kota ditentukan berdasarkan peraturan perundang

			metode Analisis Jabatan	undangan - Melaksanakan Analisis Jabatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
5	Misi 4 : Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah			
	- Terwujudnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	- Meningkatnya koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	- Melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terencana, konsisten	- Standarisasi Melaksanakan Road Map RB Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5.	Misi 5 : Meningkatkan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Dan Menciptakan Inovasi Pelayanan Prima,			
	- Terwujudnya Penerapan Prosedur Dan Tata Kerja Prosedur dan Tata Kerja yang Efektif dan Efisien pada Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Terwujudnya Pelayanan Prima Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dan Kabupaten / Kota. - Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang baik	- Meningkatnya Penerapan Standar Operasional Prosedur pada OPD. - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. - Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Melaksanakan standarisasi sistem prosedur dan tata kerja OPD Prov.Sumbar. - Melakukan standarisasi pelayanan, prosedur dan tata kerja pelayanan publik - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Program dan Kegiatan sesuai peraturan	- Standarisasi prosedur dan tata kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Sumbar No. 36 Tahun 2011 dan No. 24 Tahun 2011 - Memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan UU No. 25 Tahun 2009 dan Perda Nomor 6 tahun 2015 serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumbar No. 62 Tahun 2016 Dan No 70 Tahun 2016 serta Pergub No. 13 Tahun 2017 -Melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor Peraturan 36 Tahun 2011 Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Organisasi Setda Prov Sumbar dalam periode 5 tahun kedepan, maka program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan indikatifnya dapat digambarkan dengan 7 (tujuh) tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah
2. Terwujudnya Dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Terwujudnya Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Akuntabel.
4. Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
5. Terlaksananya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara Berkelanjutan.
6. Meningkatkan Prosedur Dan Tata Kerja yang Efektif dan Efisien pada Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Terwujudnya Pelayanan Prima Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten / Kota.

Untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut disusunlah sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sekretariat Daerah.
2. Meningkatnya Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Aparatur Provinsi.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi, OPD Provinsi Dan Kabupaten / Kota.
4. Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
5. Meningkatnya Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.
6. Meningkatnya Koordinasi Penarapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Meningkatnya Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Organisasi Perangkat Daerah.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, mengacu kepada strategi dan kebijakan, maka pencapaiannya akan diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam tabel T-C.27.

Tabel T-C.27.
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,DAN PENDANAAN BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka														Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
SETDA BIRO ORGANISASI							4,014,710		5,530,830		4,476,482		5,131,153		5,635,000		5,856,575		30,039,855		
Mewujudkan manajemen administrasi perkantoran yang baik	Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi		PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	224,845	100%	248,359	100%	540,779	100%	604,895	100%	751,500	100%	861,700	100%	2.627.183,6	Bag. Ketatalaksanaan	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Sarana Surat Menyurat	12 bulan	-	-	-	-	2,500	12 Bulan	35,069	12 Bulan	40,000	12 Bulan	40,000	36 bulan	115069			
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air listrik dan telepon	12 bulan	12 Bulan	3,265	12 Bulan	4,200	12 Bulan	3,876	12 Bulan	4,200	12 Bulan	4000	12 Bulan	4,200	72 bulan	23,741		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor	12 bulan	12 Bulan	16,310	12 Bulan	17,064	12 Bulan	30,358	12 Bulan	31,998	12 Bulan	45000	12 Bulan	50,000	72 bulan	190,730		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang menunjang	12 bulan	60 kotak, 113 buku, 1595 buah, 15 rim dan 20.000 lembar	30,000	Amplop (60 kotak), Kop Setda (20 Rim), Map Dinas (2000 Buah), Buku BKJ (15 Buku), Lembar disposisi (15 buku), Kwitansi (41 buku), Blanko SPPD (20 Buku), Kop Gubernur (5 Rim)	30,500	Amplop (60 kotak), Kop Setda (25 Rim), Map Dinas (3000 Buah), Lembar disposisi (24 buku), Kwitansi (60 buku), Blanko SPPD (60 Buku), Kop Gubernur (10 Rim), Photo Copy (59007 lembar)	48,280	Amplop (60 kotak), Kop Setda (25 Rim), Map Dinas (3000 Buah), Lembar disposisi (24 buku), Kwitansi (60 buku), Blanko SPPD (60 Buku), Kop Gubernur (10 Rim), Photo Copy (59007 lembar)	65,000	Amplop (60 kotak), Kop Setda (25 Rim), Map Dinas (3000 Buah), Lembar disposisi (24 buku), Kwitansi (60 buku), Blanko SPPD (60 Buku), Kop Gubernur (10 Rim), Photo Copy (59007 lembar)	50000	Amplop (60 kotak), Kop Setda (25 Rim), Map Dinas (3000 Buah), Lembar disposisi (24 buku), Kwitansi (60 buku), Blanko SPPD (60 Buku), Kop Gubernur (10 Rim), Photo Copy (59007 lembar)	55,000	Amplop (60 kotak), Kop Setda (25 Rim), Map Dinas (3000 Buah), Lembar disposisi (24 buku), Kwitansi (60 buku), Blanko SPPD (60 Buku), Kop Gubernur (10 Rim), Photo Copy (59007 lembar)	72 bulan	279,180	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum untuk Rapat	12 bulan	1035 Orang	10.000	280 porsi	13.600	464 kotak	12.544	464 kotak	13.000	464 kotak	12500	464 kotak	12.500		74,144	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang diikuti	12 bulan	45 kali	165,270	45 kali	182,595	76 kali	443,221	76 kali	455,628	76 kali	600,000	76 kali	700,000		2,546,714	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana pelayanan		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	10%	10%	76,550	10%	112,610	10%	285,255	20%	620,020	20%	518,000	30%	281,000	100%	1,893,435	Bag. Ketatalaksanaan
				Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona Hijau)																
			Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah Komputer, Printer, Proyektor, Penghancur Kertas dan Infocus yang diadakan	100%	2 Unit Komputer/Lap Top	20.400	2 Unit Komputer/Lap Top	30.000	4 Unit Komputer PC, 4 /Lap Unit Printer, 1 unit Penghancur Kertas dan 1 unit Projector	85,088	2 Unit PC, 2 Unit Printer,	36.000	2 Unit PC, 1 Unit Laptop, 2 Unit Printer,	54000	-		100%	225,488	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Studio yang tersedia								Sekat Ruangan Kerja	78.000							78.000
			Pengadaan Meubelur	Perlengkapan kantor dan mobilier yang diadakan	100%	8 unit almari	17,400	6 Unit Kursi, 6 Unit Meja Kantor	30,000	4 Unit Meja kerja Eselon II/III, 4 Unit Kursi kerja Eselon II/III, 30 Unit kursi susun	111,980	9 Unit Meja ess IV, 9 Unit Kursi Kerja ess IV	162,000			10 Unit Meja dan kursi kerja Staf	160,000	100%	481,380	
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan Operasional	100%	-	-	-	-	-	-	1 Unit Kendaraan Roda 4	250,000	1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	350,000	-	-		600,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan																
			Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya Pembayaran Honorarium KPA,PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator SIPKD	12 Bulan	12 Bulan	105,562	12 Bulan	113,662	12 Bulan	123,659	12 Bulan	106,491	12 Bulan	125,000	12 Bulan	125,000	72 bulan	699,374	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Pelaksanaan Tugas Biro yang disusun	12 Bulan	5 Dokumen	43,255	10 Dokumen	43,255	10 Dokumen	57,313	10 Dokumen	97,016	10 Dokumen	59,000	10 Dokumen	59,000	55 dokumen	358,839	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Prov. Sumbang	Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (skor hasil evaluasi AKIP)			484,999	BB	889,724	BB	425,137	A	432,000	A	495,000	A	597,000	A	3,323,860	Bag. Pengembangan Kinerja
				Persentase SKPD Yang Telah Mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi AKIP >=70		50		60		70		80		90		100		100		
			Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun	1 Dok/95 Eks	1 Dokumen/70 Eksemplar	120.000	1 Dokumen/65 Eksemplar	120.000	1 Dokumen/65 Eksemplar	196.294	1 Dokumen/65 Eksemplar	199.000	1 Dokumen/65 Eksemplar	200000	1 Dokumen/60 Eksemplar	250.000	100%	1.085.294	
			Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	Penetapan Dokumen PK Tahun 2016	1 Dok/60 Eksemplar	1 Dok/60 Eksemplar	90.000												90.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)				
			Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintahan Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	1 Dok/60 Eksemplar							1 Dokumen/60 Eksemplar	89,000	1 Dokumen/60 Eksemplar	93,000	1 Dokumen/60 Eksemplar	93,000	100%	275,000		
			Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	Penetapan Dokumen PK Tahun 2017	1 Dokumen/60 Eksemplar			1 Dokumen/60 Eksemplar	699,545									1 Dok/60 Eksemplar	699,545		
			Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun				1 Dokumen/60 Eksemplar	85,462									1 Dokumen/60 Eksemplar	85,462		
			Monev Pencapaian Penetapan Kinerja SKPD Prov. Sumbar	Jumlah OPD yang di Monev Pencapaian Target PK		2 Dok/60 Eksemplar	80,000	50 OPD	12,577									50 OPD	92,577		
			Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar	Laporan Hasil Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Jumlah OPD yang di Monev						50 OPD	39,802							50 OPD	39,802		
			Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar	Jumlah OPD yang di Monev pencapaian target Perjanjian Kinerja								50 OPD	40,000	50 OPD	45,000	50 OPD	47,000	150 OPD	132,000		
			Bimtek SAKIP Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Sakip			136 Orang		118,544											118,544	
			Pengujian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Provinsi Sumbar	Jumlah Peserta	100%	-	-	117 Orang	57,602	-	-	-	-	-	-	-	-	117 Orang	57,602		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target
			Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se- Sumbar	Jumlah Peserta Bimtek dan Anggota Tim Akuntabilitas yang dilatih					157 Orang Peserta dan 15 ToT	103.579							157 Orang Peserta dan 15 ToT	103.579		
			Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat	Jumlah Peserta Bimtek dan Anggota Tim Akuntabilitas yang dilatih							150 Orang	104.000	157 Orang	157.000	150 Orang	207.000	457 Orang	468.000		
			Pembinaan Penyusunan Renstra SKPD Provinsi	Jumlah SKPD yang difasilitasi		49 SKPD	76.455										49 SKPD	76.455		
			Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD Provinsi	Jumlah SKPD yang difasilitasi		-	-										-	-		
Terlaksananya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan	Meningkatnya Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi Pem.Prov Sumbar		Pemahaman Tentang Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	10	267,760	10	0	15	0	15	0	20	0	20	0	90	267,760	Bag. Pengembangan Kinerja
			Penerbitan Buletin Organisasi dan Aparatur	Jumlah Buletin Organisasi dan Aparatur yang diterbitkan		5 Edisi/2000 Buku	126.828										5 Edisi/2000 Buku	126.828		
			Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Peserta Sosialisasi		101 Orang Eselon III dan IV	67.236										101 Orang Eselon III dan IV	67.236		
			Penetapan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Pergub yang diadakan		1 Pergub	73.696										1 Pergub	73.696		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target
Terlaksananya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan	Meningkatnya Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi Pem.Prov Sumbar		MANAJEMEN PERUBAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	10	0	10	70,412	15	104,255	15	370,273	20	385,000	20	385,000	90	1,314,940	Bag. Penge mbangan Kinerja
			Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Peserta Sosialisasi	100%			55 Orang Ess III dan Ess IV	70,412	69 Orang	104,255							55 Orang Ess III dan Ess IV	174,667	
			Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Jumlah Pesert Sosialisasi	100%							138 orang	134,000	138 orang	135,000	138 orang	135,000	414 Orang	404,000	
			Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Sumbar	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%							80%	236,273	90%	250,000	100%	250,000	100%	736,273	
Meningkatkan penataan OPD Prov.Sumbar yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Terwujudnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran		PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan		51	1,560,890	55%	2,684,270	65%	1,607,506	75	1,357,309	90	1,433,875	100	1,511,875	100	10,155,725	Bag. Kelemb agaan
Meningkatnya pembinaan kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Terwujudnya fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota			Persentase Penurunan Rician Tupoksi Yang Tumpang Tindih				20%		40%		60		80		100		100		Bag. Kelemb agaan
Meningkatnya Penataan Jabatan yang efektif dan efisien	Terwujudnya jabatan Pada perangkat daerah yang efektif dan efisien		Penataan Jabatan Perangkat Daerah	Penetapan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan pada Perangkat Daerah	100%							22 OPD	400,000	22 OPD	300,000	22 OPD	300,000	100%	1,000,000	
			Bimbingan Teknis Penataan Jabatan	Jumlah Peserta BimTek	100%							50 Peserta	116,201	50 Peserta	120,000	50 Peserta	170,000	100%	406,201	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target
			Penyusunan Evaluasi Jabatan	Pergub Analisa Jabatan pada SKPD sesuai Permendagri No.35 tahun 2012	100%	1 Dokumen	350,883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,883		
			Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Laporan Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi	100%	19 Rekomendasi	250001.111	3 Pergub	300,000	10 Kab/Kota	150,000	10 Kab/Kota	148,000	10 Kab/Kota	160000	10 Kab/Kota	200,000	100%	1,208,001	
			Rakomis Kelembagaan Kab/kota se- Sumatera Barat	Peserta Rakomis	100%	40 orang	70,000	1juknis/1 laporan	250,000	38 orang	111,875	38 orang	111,375	38 orang	211,875	38 orang	211,875	100%	967,000	
			Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/kota	Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	100%					1 Dokumen	120,000	1 Dokumen	118,000	1 Dokumen	130000	1 Dokumen	130,000	4 dokumen	498,000	
			Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		1 Dokumen	90,000											1 Dokumen	90,000	
			Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota	Laporan Kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	300,000									1 Dokumen	300,000	
			Bimbingan Teknis Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Peserta BimtekAnjab ABK dan Evaluasi Jabatan				5 Ranperda	350,000									5 Ranperda	350,000	
			Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis, Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Jumlah analisis beban kerja						50 Orang	118,202							50 Orang	118,202	
			Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Beban Kerja	Jumlah analisis beban kerja															0	
			Penyusunan Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Dokumen Anjab OPD				46 Badan/Dinas/Biro	484270									46 Badan/Dinas/Biro	484,270	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)		Target	Rp (jt)
			Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Dokumen Anjab OPD					1 Ranpergub	261,133							1 Ranpergub	261,133		
			Penyusunan Analisis Jabatan dan Pembinaan penyusunan Analisis Jabatan Kab/kota	Dokumen Anjab OPD	100%	-	-	5 Pergub	300,000	22 OPD	261,529						100%	581,529		
			Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya produk hukum daerah terkait kelembagaan OPD/UPT/Cabang Dinas	100%	3 Ranperda/ Produk Hukum Daerah	750005.557	100%	400,000	100%	314,033	100%	313,000	100%	232000	100%	210,000	100%	2,219,038	
			Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Ranperda/Ranpergub SOTK Provinsi Sumatera Barat		1 Pergub	50,000	3 Pergub	300,000								4 Pergub	350,000		
			Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Ranperda/Ranpergub SOTK Provinsi Sumatera Barat						100%	250,734						100%	250,734		
			Penyusunan Rincian Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya produk hukum daerah terkait Tupoksi kelembagaan OPD/UPT/Cabang Dinas	100%					100%	150,733	100%	280,000	100%	290,000	100%		720,733		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)		Target	Rp (jt)
Meningkatnya penerapan prosedur dan tata kerja yang efektif dan efisien pada ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Organisasi Perangkat Daerah		PENGUATAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase SKPD Yang Menerapkan SOP Secara Baik		70	295761.75	70	372803.286	80	421788.571	85	626.500	90	807.000	100	855.000	100	3.378.854	Bag. Ketatalaksanaan
Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur						70		70%		80%		80		85		85		85		
			Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	4 SOP Sekretariat Daerah		4 Laporan	61981.36											4 Laporan	61.981	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah SOP yang tersusun				8 SOP	60.515									8 SOP	60.515	
			Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah SOP yang tersusun						10 OPD	109.303							10 OPD	109.303	
			Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. Dan Kab/Kota	SOP OPD Provinsi yang tersusun	100%							15 OPD	168.800	15 OPD	190.000	15 OPD	200.000	100%	558.800	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target
			Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan	100%			4 Kab/Kota	44,146	4 Kab/Kota	45,676	4 Kab/Kota	48,800	4 Kab/Kota	102,000	4 Kab/Kota	105,000	20 Kab/Kota	345,622	
			Penguatan Ketatalaksanaan Prov. Dan Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan		4 Kab/Kota	30,465											4 Kab/Kota	30,465	
			Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi	Peserta yang mengikuti FORKOMPANDA	100%	45 orang	63,692	60 Orang	76,151	60 Orang	82,996	60 Orang	81,800	60 Orang	120,000	60 Orang	150,000	345 Orang	574,639	
			Penyusunan Standar Analisa Belanja Umum	Pergub Standar Analisa Belanja Umum						1 pergub	60,000	1 pergub	88,800	1 pergub	150,000	1 pergub	150,000	4 Pergub	448,800	
			Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda Pelayanan Publik		100%	2 Pergub	50722.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50722.74	
			Penyusunan SOP Sub-Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar	Jumlah SOP yang tersusun	100%	-	-	17 Dokumen SOP	21,229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,229	
			Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Unit Kerja Pelayanan Publik yang dinilai				10 UKPP Prov dan 10 UKPP kab/Kota %	231,277											
			Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	Unit Kerja Pelayanan Publik yang dinilai	100%	7 UKPP	150,882			10 UKPP Prov dan 10 UKPP kab/Kota %	233,116	10 UKPP Prov dan 10 UKPP kab/Kota %	238,300	10 UKPP Prov dan 10 UKPP kab/Kota %	245,000	10 UKPP Prov dan 10 UKPP kab/Kota %	250,000	100%	1,117,298	
Meningkatnya Manajemen pelayanan kepegawaian Sekretariat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Aparatur Setda		PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Persentase Kesesuaian Akurasi Data PNS Setda Dan Pemprov. Sumbar	100%	100%	685,110	100%	517,461	100%	438,704	100%	533,414	100%	571,625	100%	521,000	100%	3,267,314	Bag. Pengembangan Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target	Rp (jt)
Terwujudnya Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya Rekomendasi Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Aparatur Provinsi			Persentase PNS Yang Dikembangkan Karirnya Di lingkungan Pemprov Sumbar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bag. Pengembangan Kinerja	
			Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	100%	100%	67,866		550 orang	71,484	550 orang	72,000	550 orang	75000	550 orang	77,000	100%	363,349			
			Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah PNS Setda yang dilayani			100%	67,866									100%	67,866			
			Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumbar	Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar		100%	58,257										100%	58,257			
			Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar	Peningkatan Disiplin Pegawai Sekretariat Daerah Prov. Sumbar	100%			100%	65,378	1 Dokumen	77,494	1 Dokumen	62,882	1 Dokumen	84000	1 Dokumen	85,000	100%	374,764		
			Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian PNS Setda Provinsi Sumbar	Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Dokumentasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Sumbar		100%	35,930										100%	35,930			
			Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda	Jumlah Laporan Data Kepegawaian	100%			100%	35,930			4 Dokumen	64,000	4 Dokumen	67000	4 Dokumen	70,000	100%	236,930		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)		Target	Rp (jt)
			Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Tersedianya Data Tentang Tenaga PPPK	100%	-	-	-	-	1 Laporan	53,495	1 Laporan	54,000	1 Laporan	57,000	100%	60,000	100%	224,495	
			Penyusunan Formasi Jabatan PNS Setda Prov. Sumbar	Jumlah Dokumen dan Laporan Kegiatan Penyusunan Formasi PNS								Dokumen/Laporan (20 Buku)	16,108	Dokumen/Laporan (20 Buku)	25,000					
			Kajian Kesejahteraan Aparatur Dilingkungan Pemprov. Sumbar	Laporan Hasil Kegiatan Kesejahteraan Aparatur								1 Dokumen/Rekomendasi	40,000	1 Dokumen/Rekomendasi	40,000					
			Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai ASN Prov. Sumbar	Tercetaknya kartu pengenal ASN	100%	100%	35,550	100%	50,927	100%	36,351	-	-	-	-	-	-	100%	35,550	
			Pembinaan Mental PNS bermasalah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya konseling PNS Bermasalah sebanyak 20 orang pada SKPD		1 Dokumen	56,000													
			Konseling PNS bermasalah dilingkungan Pemprov	Terlaksananya konseling PNS Bermasalah sebanyak 20 orang pada SKPD	100%	100%	56,000											100%	56,000	
			Monitoring dan Evaluasi BPJS Ketenagakerjaan dan PT. Taspem (Persero) terhadap PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Kelancaran pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspem Cabang Padang dan Bukittinggi terhadap PNS Prov. Sumbar	100%	100%	70,000											100%	70,000	
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan jasa tenaga sopir, jasa pengamanan kantor dan jasa petugas kebersihan dilingkungan Pem Prov. Sumbar	Kelancaran pelaksanaan penggunaan jasa tenaga sopir, pengamanan kantor dan petugas kebersihan di lingkungan Pem. Prov. Sumbar	100%	100%	60,000											100%	60,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target
			Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai ASN di Lingkungan Pemprov. Sumbar	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai ASN di Lingkungan pemprov. Sumbar	100%	-	-	100%	50.927	-	-	-	-	-	-	-	100%	50.927		
Terciptanya Inovasi Pelayanan Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rata-Rata Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	100%	B	235,709	B	438,642	B	387,416	B	310,200	B	402,000	B	570,000	B	2,343,967	Bag. Ketatalaksanaan
				Persentase Kepatuhan Seluruh SKPD Provinsi Terhadap Pelaksanaan UIU Pelayanan Publik		5.31		7.89%		11%		12		15		15		58.6		
						10		10%		10%		15		15		15				
			Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah UKPP yang Dibina	100%	8 Unit Pelayanan Publik	45,313	6 unit pelayanan publik	66,213	6 unit pelayanan publik	50,415	6 unit pelayanan publik	53,800	6 unit pelayanan publik	57,000	6 unit pelayanan publik	110,000	100%	382,741	
			Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Prov. Sumbar	100%	1 Dokumen/ 5 buku	51,932	1 dokumen / 5 buku	81,348	2 Laporan	59,120	2 Laporan	58,800	2 Laporan	90000	2 Laporan	170,000	100%	511,199	
			Pembinaan OPD terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Peserta	100%	-	-	-	-			100 orang	70,800	100 orang	125000	100 orang	150,000	100%	345,800	
			Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat																0	
			Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat					50 Orang	54,576										54,576	
			Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)							100 orang	70,842								70,842	
			Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Laporan Penyusunan dan Penerapan SPM	100%	50 orang	47,115	160 orang	96,211	4 Laporan	81,082	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	100%	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target
			Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Peserta Rakornis Pelayanan Publik	100%	-	-	-	-	100 orang	125.958	100 orang	126.800	100 orang	130000	100 orang	140.000	100%	522,758	
			Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 2 Unit Pelayanan Masyarakat	Jumlah unit pelayanan publik yang diukur IKMnya	100%	2 UKPP	91,349	3 UKPP	140,295	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	231,644	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIRO ORGANISASI

Terselenggaranya Pemerintah yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, disamping itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, dan untuk itu setiap Pemerintah Daerah harus dapat menetapkan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan yang terukur sehingga akan tercipta Legitimasi dan dukungan public terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kinerja merupakan hasil kerja, baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh individu atau lembaga. Untuk mewujudkan kinerja yang valid, Biro Organisasi menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam penyusunan sasaran strategis beserta Indikator yang dapat diukur. Pendekatan penentuan kinerja tersebut adalah :

1. Membuat pohon kinerja (Cascading),
2. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk Kinerja penyelenggaraan yang baik dan Akuntabel juga harus memperhatikan 4 (Empat) Variable yaitu:

- a. Tercapainya Prinsip Pengelolaan Kinerja Berorientasi Hasil
- b. Adanya Keselarasan artinya memiliki keterkaitan sebab akibat dan sinergitas
- c. Adanya ukuran kinerja yang terukur dan relevan
- d. Adanya Target kinerja yang terukur dan logis

Pohon Kinerja dalam konteks manajemen artinya adalah suatu penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang diturunkan serta dipastikan dan diyakinkan akan menghasilkan apa yang akan dicapai dan sasaran strategis, Indikator Utama dan target indicator yang selaras baik secara vertical maupun horizontal.

Sasaran Biro Organisasi periode 2016 s/d 2021 yang dikaitkan dengan tujuan pohon kinerja terdapat 4 (Empat) Sasaran strategis yang akan dicapai Biro Organisasi dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun, adapun sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada table T-C.28. berikut ini

TABEL T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Pada Periode RPJMD	Target Capaian Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	- Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	-	BB	-	-	-	-	-
	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	-	-	2	5	8	15	15
2	- Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan perundang-Undangan	51	55	-	-	-	-	-
	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai Perundang-Undangan Kelembagaan	-	-	60	70	90	100	100
3	Rata- Rata IKM	-	75	78	-	-	-	-
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	-	-	10	10	15	15	15
4	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi		B	-	-	-	-	-

	4.2 Persentase Capaian Realisasi Fsik dan Keuangan Pelaksanaan Program Kegiatan							
	- Realisasi Fisik (%)	100	-	-	-	-	-	-
	- Realisasi Keuangan (%)	95	-	-	-	-	-	-
	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	4.2 Persentase Capaian Realisasi Fsik dan Keuangan Pelaksanaan Program Kegiatan							
	- Realisasi Fisik (%)	-	100	100	100	100	100	100
	- Realisasi Keuangan (%)	-	95	95	95	95	95	95




BAB VIII

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, berarti Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pada Bagian di Lingkungan Biro Organisasi selama kurun waktu 2016 – 2021 agar mempedomani Renstra ini.

Padang, Desember 2018

KEPALA BIRO ORGANISASI,


IRWAN, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001